

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PEMASUKAN, PENYIMPANAN, PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA MEMPRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT (Studi Kasus di Distrik Manokwari Barat)

ISAK WONDIWOI, S.IP, MPA

Dosen Pada STISIPOL Silas Papare Jayapura

Abstrak: Kebijakan Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam pembangunan sosial budaya adalah mewujudkan Manokwari sebagai Kota Bersejarah (Bersih, Sehat, Rapih, Aman, dan Hidup). Dalam rangka menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Kota Bersejarah, dan dalam menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan tentram dengan berciri agamis, Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari menggunakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Larangan Pemasukan, Pengeradan, dan Penjualan serta Memproduksi Minuman Beralkohol di Wilayah Kabupaten Manokwari.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol, yang menyoroti bagaimana implementasi kebijakan yang dilaksanakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dengan menggunakan pendapat Jones yang meliputi factor organisasi, interpretasi, dan aplikasi, serta upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Manokwari di Distrik manokwari Barat, belum terlaksana secara optimal. Beberapa kendala ditemui disebabkan karena kurangnya kemampuan sumber daya aparat, kurangnya sarana dan prasarana penunjang, dan kurangnya alokasi anggaran yang memadai.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Ketentraman dan Ketertiban

Abstract: Government policy Manokwari in socio-cultural development is realizing Manokwari as Historic City (Clean, Healthy, Neat, Safe, and Life). In order to keep the values contained in the Historic City, and in creating a community environment that is safe, orderly and peaceful with religious in character, use of Manokwari Kabuoaten Local Government Regional Regulation No. 5 of 2006 on the Prohibition of Importation, Pengeradan and Beverage Sales and Producing alcoholic in Manokwari Regency.

The method used in this research is descriptive qualitative approach, where the techniques of data collection through interviews, observation, and telaah documents. This study focused on the implementation of policy implementation ban importation, storage, circulation, and sale of alcoholic beverages as well memproduksi, which highlights how the implementation of the policies implemented, and the factors that affect the implementation of the policy by using the Jones opinion that include organizational factors, interpretation, and application, as well as the efforts made to implement the policy.

The results showed that the implementation of the policy of banning importation, storage, circulation, and sale of alcoholic beverages and memproduksi organized Civil Service Police Unit Manokwari, Manokwari District West, has not been implemented optimally. Some of the obstacles

encountered due to lack of resources and capacity apparatus, lack of facilities and infrastructure, and the lack of adequate budget allocation.

Keywords: *Implementation Policy, Peace and Order.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Manokwari sebagai salah satu wilayah di Provinsi Papua Barat yang dipercaya Pemerintah Pusat sebagai Ibukota Provinsi Papua Barat, memiliki peluang dan harapan sebagai kota besar, seperti halnya kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Hal itu terlihat dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menata diri dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki guna pembangunan daerahnya. Salah satu kiat yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam rangka pembangunan sosial budaya adalah bagaimana mewujudkan Manokwari sebagai Kota BERSEJARA (Bersih, Sehat, Jaya, Rapih, Aman dan Hidup).

Manokwari sudah dikenal oleh masyarakat Papua dengan julukan Kota Injil dan kota peradaban bagi orang Papua. Oleh sebab itu konsekuensi yang perlu dilakukan dalam rangka menjaga dan mewarisi nilai-nilai tersebut, sekaligus dalam rangka menciptakan kondisi lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteran serta bercirikan agamis, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Larangan Pemasukan, Penyimpanan, Pengedaran, dan Penjualan serta Memproduksi Minuman Beralkohol di Wilayah Kabupaten Manokwari.

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Perda tersebut untuk mencegah keterlibatan masyarakat kepada hal-hal yang sifatnya negatif sebagai dampak dari pengaruh minuman beralkohol, sekaligus menjaga pencitraan Kabupaten Manokwari sebagai kabupaten yang Bersih, Sehat, Jaya, Rapih, Aman, dan Hidup. Namun demikian upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti halnya dalam implementasinya di wilayah Distrik Manokwari Barat. Hal itu disebabkan karena karakteristik masyarakat Distrik Manokwari Barat merupakan komunitas masyarakat yang sifatnya heterogen, dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, sehingga bagi sebagian kalangan masyarakat, mengkonsumsi

minuman beralkohol merupakan sesuatu hal yang dianggap biasa dilakukan.

Kenyataan yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa walaupun larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol, telah 7 (tujuh) tahun diimplementasikan, namun hingga kini minuman berkadar alkohol tinggi masih dijualbelikan secara bebas oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab yang bekerjasama dengan aparat demi untuk kepentingan bisnis semata. Minuman beralkohol masih dengan mudah diperoleh dan dibeli dengan bebas di kalangan masyarakat, baik minuman beralkohol yang diproduksi secara tradisional, maupun minuman yang dipasok dari luar daerah

Realitas menunjukkan bahwa walaupun kebijakan telah diimplementasikan, namun belum dapat terselenggara secara optimal. Padahal dalam rangka menertibkan larangan pemasukan, penyimpanan dan penjualan, serta memproduksi minuman beralkohol, Pemerintah Kabupaten Manokwari telah membentuk Tim Operasional Pengawasan Minuman Beralkohol melalui Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor 114 Tahun 2010. Hal itu disebabkan karena kurangnya dukungan secara aktif dari para pelaksana kebijakan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang diembannya.

Implementasi Perda dinilai oleh banyak kalangan terutama tokoh agama dan tokoh masyarakat belum terlaksana secara optimal, sehingga peredaran minuman beralkohol di Distrik Manokwari Barat masih berlangsung, dengan masih ditemui pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol, memberi dampak bagi generasi muda, sehingga dapat menghambat perwujudan Manokwari sebagai Kota Injil. Hal ini dapat terjadi karena belum optimalnya Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menegakkan Perda di Distrik Manokwari Barat.

KERANGKA TEORI

Implementasi kebijakan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena apabila suatu kebijakan jika tidak diimplementasikan, maka akan menjadi sekedar impian belaka. Perhatian terhadap implementasi kebijakan menjadi penting agar setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat dilaksanakan atau dijalankan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah (badan atau individu) yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berkualitasnya suatu kebijakan yang diimplementasikan sangat berpengaruh pada persepsi masyarakat, karena masyarakat merupakan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut. Untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan terutama pelayanan publik, maka salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah menyangkut profesionalisme kinerja aparat yang ditunjukkan sebagai refleksi dari tugas dan tanggungjawab yang diemban, proses penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Esensi implementasi kebijakan sangat berkaitan dengan aktifitas fungsional penyelenggaraan tujuan publik sehingga betul-betul mengena pada sasarannya. Makna implementasi kebijakan adalah memahami dan melaksanakan apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan ditetapkan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Karena sesungguhnya Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar menyangkut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, menyangkut dengan keputusan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Jones (1994:166) dinyatakan bahwa "Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah kebijakan (program)., yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Organisasi itu memiliki struktur, kegiatan, perintah, tanggung jawab, metode, dan dukungan dari pihak yang berkompeten. Kemudian organisasi dimaksud melakukan berbagai interpretasi terhadap kebijakan berdasarkan

patokan, ketelitian, komitmen, prioritas, perkiraan, dan penafsiran.

Selain itu organisasi juga mengaplikasikan kebijakan berupa proses dinamis yang terarah dengan menyesuaikan perilaku para pelaksananya. Implementasi kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol adalah bentuk pelaksanaan fungsi implementasi yakni organisasi (organization), interpretasi (interpretation), dan aplikasi (application) sehingga dapat menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sebagai bentuk perwujudan Manokwari yang Bersih, Sehat, Jaya, Rapih, Aman, dan Hidup (BERSEJARAH). Implementasi kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol, agar dapat berhasil sesuai dengan tujuan kebijakan, maka sebuah kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan harus diimplementasikan, karena bila kebijakan yang sebaik itu tidak dilakukan sesuai dengan tujuan maka kebijakan tersebut akan menjadi sia-sia atau gagal dalam penerapannya.

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dimana peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan baik berstruktur maupun tidak berstruktur. Karena penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang lebih detail dan mendalam atas kebenaran data, maka tidak cukup dengan wawancara biasa akan tetapi harus lebih jauh dan mendalam. Sebagaimana pendapat Effendy (2010:132) bahwa "wawancara mendalam adalah pertanyaan dan respon terbuka untuk mendapatkan data berdasarkan maksud dan bagaimana mereka menjelaskan atau membuatnya berarti atas kejadian-kejadian penting dalam hidup mereka".

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja selalu eksis dan tidak berubah, karena selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran pertama berkaitan erat dengan eksistensi Pemerintah Daerah, karena keberadaannya didukung dengan berbagai Peraturan Daerah yang ada, sehingga jelas mempengaruhi kapasitas daerah dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan peran kedua berkaitan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah, yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Mengingat penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidaklah gampang, sehingga dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait demi menyukseskan kebijakan tersebut ketika diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu, (Sunggono, 1994:137).

Agar implementasi kebijakan itu dapat berhasil sesuai tujuannya, maka peran unsur pendukung seperti sumber daya, dan organisasi sangat penting. Karena efektif atau berhasilnya suatu kebijakan dalam implementasinya karena adanya faktor pendukung dan penghambat yang kerap kali melingkupi kebijakan tersebut dalam implementasinya baik secara implisit maupun eksplisit. Karena keberhasilannya sangat ditentukan oleh sumber daya termasuk di dalamnya aparat pelaksana (staf), fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung dan anggaran yang tersedia dalam organisasi.

Mengacu pada kewenangan yang dimiliki Satpol PP, jelas diperlukan sumber daya aparat yang memadai, walaupun bukan satu-satunya penentu keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dilaksanakan. Kondisi ini dapat dimengerti karena Satpol PP tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat, tetapi juga menegakkan Peraturan Daerah. Oleh sebab itu kualitas aparat Satpol PP tidak hanya terukur dari kemampuannya untuk mengelola dan melaksanakan tugas dan fungsi saja, tetapi juga bagaimana menjalin hubungan yang harmonis diantara sesama aparat, dan masyarakat.

Realitas yang ditemui di lapangan terlihat bahwa jumlah aparat yang dimiliki oleh Satpol PP telah mencukupi dari aspek kuantitas, karena melalui kebijakan yang dilakukan Bupati telah diangkat tenaga honorer sebanyak 700 orang, sementara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 25 orang. Namun dari aspek kualitas, dari jumlah aparat yang dimiliki oleh

Satpol PP belumlah memadai karena sebagian besar aparat tersebut memiliki pendidikan setingkat SLTA, malah ada sebagian aparat yang memiliki pendidikan setingkat SLTP.

Memperhatikan dinamika perkembangan kebutuhan organisasi Satpol PP maka pengembangan sumber daya aparat yang sesuai dengan tugas dan fungsi sangatlah penting. Oleh sebab itu salah satu langkah yang perlu dilakukan dalam melaksanakan kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol, adalah dengan meningkatsertakan setiap aparat terutama pada level Kepala Bidang melalui berbagai jenis Diklat yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada posisi yang demikian, dengan kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh setiap aparat, berimbas pada tingkat partisipasi mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

Disamping tingkat pengetahuan, salah satu faktor berhasilnya penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban Satpol PP adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat menunjang pelaksanaan kebijakan. Namun demikian yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol, yang diselenggarakan di Distrik Manokwari Barat, fasilitas yang dimiliki sangatlah terbatas. Hingga saat ini prasarana kantor yang dimiliki Satpol PP, cukup memadai, namun belum ada ruangan yang disediakan khusus untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, sekaligus tempat pengaduan masyarakat.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006

Analisis dan interpretasi Implementasi kebijakan larangan bantuan, dalam dengan penelitian ini mengacu pada model implementasi kebijakan yang dikemukakan Jones. Secara fungsional, Jones mengemukakan tiga kegiatan yang perlu dilakukan dalam bentuk pelaksanaan atau penerapan implementasi yaitu *organization*, *interpretation and application*. Organisasi itu memiliki struktur, kegiatan, perintah, tanggung jawab, metode, dan dukungan dari pihak terkait. Kemudian organisasi dimaksud melakukan

berbagai interpretasi terhadap kebijakan berdasarkan patokan, ketelitian, komitmen, prioritas, perkiraan, dan penafsiran. Selain itu organisasi juga mengaplikasikan kebijakan berupa proses dinamis yang terarah dengan menyesuaikan perilaku para pelaksananya.

a. Organisasi

Implementasi kebijakan merupakan salah satu dari tahapan kebijakan, dimana sebuah kebijakan dapat memiliki makna dan memberikan dampak bagi masyarakat ketika diimplementasikan di lapangan. Efektifnya sebuah kebijakan diimplementasikan sangat bergantung pada kemampuan organisasi yang melaksanakan kebijakan tersebut. Sebagai sebuah organisasi yang dinamis, maka kehandalan organisasi Satpol PP dalam melaksanakan kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol membutuhkan sumber daya aparatur yang memiliki kemampuan dalam memahami isi kebijakan, memahami tujuan kebijakan, kemampuan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, dan konsisten dalam menyusun prioritas program kegiatan.

Jones (1994:173) tergambar bahwa “peran organisasi (Satpol PP) dalam proses kebijakan memiliki dampak bagi pencapaian tujuan program”. Hal itu karena organisasi Satpol PP berada dekat dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Oleh sebab itu sebagai organisasi sebagai pelaksana kebijakan, Satpol PP dituntut untuk bertanggung jawab guna menjamin terlaksananya suatu kebijakan, karena itu pembentukan dan penataannya hendaknya sesuai dengan kebutuhan sehingga organisasi dapat berhasil meraih tujuan secara efektif.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa walaupun tim pengawas telah dibentuk oleh pemerintah daerah, namun belum dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu Satpol PP sebagai organisasi dalam melaksanakan implementasi kebijakan agar dapat berhasil sebagaimana yang diharapkan, maka dibutuhkan adanya fungsi pengorganisasian yang teratur sehingga semua pekerjaan dapat terdistribusi melalui saling koordinasi dan komunikasi yang pada akhirnya dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan kebijakan. Namun kenyataan peran organisasi Satpol PP sebagai implementor

kebijakan belum dapat bekerja dengan baik dalam mengimplementasikan kebijakan yang diselenggarakan di Distrik Manokwari Barat.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan membutuhkan dukungan sumber daya aparat yang memadai, karena aparat merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya aparat yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Namun demikian ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber aparat itu kurang, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan keberhasilannya.

Minyikapi hal itu, implementor kebijakan dituntut memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi terarah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oleh sebab itu Satpol PP dengan sumber daya aparat yang dimiliki diharapkan dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Distrik Manokwari Barat secara efektif dan efisien.

Efektivitas penyelenggaraan kebijakan, merupakan salah satu fungsi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Aktivitas tersebut merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak kepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah Daerah yang diperankan oleh Satpol PP merupakan leading sector dalam urusan penegakan Peraturan Daerah. Sebagai leading sector, maka kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol mereflesikan suatu kebijakan yang mengatur tentang pola perilaku guna menciptakan kehidupan yang tentram dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kesatuan gerak dan langkah, guna memperjelas mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan kebijakan.

Fleksibilitas tiap-tiap komponen organisasi untuk mengarahkan kepada kelompok sasaran, merupakan modal penting yang perlu terus dikembangkan dalam internal internal organisasi.

Karena sebenarnya inti permasalahan dalam implementasi kebijakan adalah bagaimana kebijakan yang dibuat disesuaikan dengan sumberdaya yang tersedia, terutama dalam meningkatkan ketertiban dan ketentraman bagi masyarakat. Untuk menyelenggarakan hal itu, dibutuhkan komitmen (political will), pimpinan melalui koordinasi yang dibangun terkait mekanisme dan prosedur yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan.

Satpol PP sebagai sebuah organisasi publik, sebenarnya memiliki kewenangan yang besar untuk dapat mewujudkan kehidupan yang tertib dan tentram dalam masyarakat ke arah yang lebih baik. Namun demikian kebijakan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, karena belum adanya pembagian tugas dan kerjasama diantara implementor kebijakan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi Satpol PP belum menyadari arti pentingnya kebijakan melalui layanan yang diberikan, sehingga harapan untuk mewujudkan Manokwari sebagai Kota peradaban belum terlaksana dengan baik.

Walaupun organisasi Satpol PP dalam melaksanakan implementasi belum optimal secara menyeluruh, namun masih terdapat sebagian aparat yang tetap berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsi walaupun kegiatan yang dilakukan sangat terbatas. Sejauh ini terlihat bahwa organisasi Satpol PP belum konsisten dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan tujuan kebijakan dan membangun hubungan kerja yang harmonis antara Satpol PP dengan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghindari minuman beralkohol.

Dampak dari kondisi yang demikian disebabkan karena walaupun Pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol, namun belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena masih terdapat segelintir masyarakat yang tetap memasukan, menyimpan, mengedar, dan menjual serta memproduksi minuman beralkohol.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran,

dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol, peranan organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja implementasi. Kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol, merupakan bagian dari kebijakan publik dalam mengatur perilaku hidup masyarakat sehingga dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, namun belum terselenggara secara optimal.

b. Interpretasi

Sebuah kebijakan itu dapat berlangsung efektif dan efisien, mudah dipahami, jika setiap kegiatan yang telah dirumuskan haruslah jelas dan rinci mengenai bagaimana suatu kegiatan itu dilakukan dan siapa-siapa saja yang akan melaksanakannya. Oleh sebab itu kebijakan yang telah ditetapkan harus disampaikan dapat dipahaminya dengan baik dan jelas kepada setiap komponen yang terlibat sebelum kebijakan itu diimplementasikan di lapangan. Karena ketidakjelasan aktor pelaksana dalam menjalankan kebijakan itu dapat menyebabkan masalah baru didalam mentransmisikan kegiatan tersebut kepada para implementor kebijakan di lapangan.

Semakin mudah implementor kebijakan memahami tujuan dari kebijakan tersebut, maka semakin mudah pula proses implementasinya. Sebagaimana dikemukakan Jones (1994:323) bahwa alasan penting lainnya untuk mengungkapkan apa, bagaimana, dan siapa dalam penafsiran “bahwa studi semacam ini lebih memfokuskan perhatian pada pengharapan para pelaksana serta yang lainnya terhadap sebuah program kebijakan. Artinya ketika Pemerintah daerah ingin menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat melalui kebijakan, maka seyogyanya setelah itu dilanjutkan dengan menafsirkannya menjadi rencana yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan oleh Satpol PP sebagai pelaksana (implementor) kebijakan.

Pemahaman terhadap Interpretasi sebuah kebijakan sedapat mungkin disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, agar dapat dimengerti dan diterima secara akurat dan mudah dipahami. Interpretasi melalui komunikasi yang dilakukan, baik secara internal maupun eksternal merupakan upaya dalam membangun sistem kerjasama atau koordinasi yang harmonis, sehingga terbangunan kesamaan persepsi guna

mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu dalam rangka mengefektifkan implementasikan kebijakan, maka terlebih dahulu harus diketahui hal apa saja yang akan atau harus disampaikan.

Realitas yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan implementor kebijakan dalam memahami makna dari kebijakan tersebut dan serta kurang adanya kejelasan dan konsistensi dalam melaksanakan pengawasan terhadap minuman beralkohol yang beredar di Distrik Manokwari Barat sehingga menimbulkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketertiman dan ketentraman dalam masyarakat. Karena pentingnya interpretasi kebijakan tersebut sangat ditekankan pada kemampuan pelaksana atau implementor program untuk menjalankan program kebijakan.

Padahal keberhasilan sebuah implementasi kebijakan tidak ditentukan saja oleh terbangunnya tingkat pemahaman pelaksana kebijakan oleh aparat pemerintah melainkan juga oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Ketika aparat pemerintah mampu memahami kebijakan tersebut maka dengan sendirinya dapat melakukan atau mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat sehingga terbangun kesamaan pengertian dan diterima dengan mudah oleh masyarakat.

Setiap kebijakan yang dirumuskan dalam proses implementasinya masih membutuhkan interpretasi maupun menjabarannya sehingga memudahkan implementor kebijakan dalam proses implementasi, maupun bagi masyarakat sebagai kelompok sasaran dalam menerima kebijakan tersebut. Demikian pula sebaliknya, sebaik apapun sebuah kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik, namun dalam implementasinya tidak berjalan secara baik, dan bahkan diabaikan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran karena kurang dimengerti dan dipahami, sehingga memungkinkan kebijakan tersebut tidak berhasil dalam implementasinya.

Menyikapi hal itu, Satpol PP dalam menginterpretasikan kebijakan, seyogyanya dituangkan ke dalam kegiatan-kegiatan strategis maupun prioritas yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga terlebih dahulu diketahui karakter dari masyarakat. Namun demikian Satpol PP belum memperlihatkan

kemampuannya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terhadap pentingnya larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol.

Kurangnya kemampuan implementer kebijakan dalam menginterpretasikan kebijakan secara operasional ke dalam perencanaan kegiatan di lapangan. Hal itu menggambarkan bahwa aparat Satpol PP belum memiliki kemampuan dan kemauan dan kejelasan dalam memahami tujuan kebijakan tersebut yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Hal ini memberi kesan bahwa Satpol PP dalam menjalankan tugas dan fungsinya, belum bekerja secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam memberantas peredaran minuman beralkohol.

Kurangnya konsistensi dari para implementor dalam menginterpretasikan kebijakan secara jelas melalui komunikasi dapat berdampak pada kurangnya kualitas implementasi kebijakan. Padahal kejelasan, ketelitian dan konsistensi dalam melaksanakan kebijakan menjadi bagian penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, ketidakjelasan dan konsistensi dalam menterjemahkan kebijakan kedalam program kegiatan yang nyata kebutuhan masyarakat niscaya menghasilkan pemahaman yang keliru terhadap esensi dari kebijakan yang dijalankan.

Dengan demikian, interpretasi sebuah kebijakan sangatlah penting, sehingga dibutuhkan kejelasan dan pemahaman yang menyeluruh terhadap makna dan hakikat kebijakan yang diimplementasikan. Sebab jika terjadi kekeliruan dalam memahami dan memaknai esensi kebijakan, maka akan menimbulkan mis-interpretasi dan kesalahpahaman terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bahkan kesalahpahaman tersebut, menimbulkan adanya multitafsir dari implementor kebijakan maupun pihak-pihak yang terlibat di dalam proses implementasi kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol yang diselenggarakan di Distrik Manokwari Barat.

c. Aplikasi

Sesuatu hal yang sangat determinan dalam implementasi kebijakan adalah kesiapan pelaksana kebijakan yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan itu, baik kemampuan keterampilan teknis, manajerial dan kemampuan

untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengintegrasikan setiap keputusan, maupun dukungan yang datang dari lembaga politik dan masyarakat. Oleh sebab itu implementor kebijakan sangat berperan dalam upaya tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan. Sebagaimana Menurut Jones (1996:293), bahwa “implementasi itu merupakan sebuah penerapan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan program”.

Aplikasi atau penerapan dalam suatu implementasi kebijakan, erat kaitannya dengan kegiatan lain yaitu kegiatan organisasi dan interpretasi. Karena aplikasi merupakan sebuah proses dinamis karena berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan lainnya dalam kemanusiaan yang mana seseorang mencoba melakukan pekerjaannya. Artinya bahwa setiap implementor kebijakan yang disertai tugas dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan publik, maka implementor kebijakan wajib melaksanakan kebijakan itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Fenomena yang muncul dalam suatu kebijakan bahwa terkadang sangat baik dalam perumusannya, namun dalam penerapan atau aplikasinya di lapangan memiliki kecenderungan tidak berlangsung sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hal itu karena masalah-masalah yang sering muncul dilapangan terkadang tidak dibahas atau tidak cantumkan dalam kebijakan yang telah dirumuskan. Sebagaimana dalam pandangan Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Nugroho (2009:501) bahwa “implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan”.

Aspek penerapan dalam penelitian ini pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram agar sadar meningkatkan kualitas hidupnya melalui pemahaman tentang pentingnya bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol. Melalui langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan masyarakat dapat mengerti, memahami, dan bahkan berpartisipasi untuk keberhasilan kebijakan tersebut. Namun sejauh ini peranan Satpol PP sebagai implementor kebijakan di mata masyarakat belum melaksanakan kebijakan dengan baik.

Realitas yang ditemui di lapangan memperlihatkan bahwa berbagai kendala yang ditemui dalam implementasi kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol, bukan saja dari kurangnya sumber daya aparat Satpol PP yang memiliki kemampuan, tetapi juga karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan kepada masyarakat. Padahal sebenarnya proses aplikasi dalam suatu implementasi kebijakan, erat kaitannya dengan kegiatan lain yaitu kegiatan organisasi dan interpretasi.

Suatu hal yang menjadi perhatian dalam proses implementasi yakni kehandalan kualitas sumber daya aparat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Namun demikian aparat Satpol PP sebagai implementor kebijakan sesungguhnya belum mampu memperlihatkan kinerjanya dalam proses implementasi kebijakan dengan bekerja selain berdasarkan pada sisi aturan yang berlaku. Disamping itu pula belum mampu melakukan pengaturan tentang bagaimana operasionalisasi pekerjaan dilakukan secara efektif sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Melihat kondisi yang demikian tergambar jelas bahwa betapa pentingnya pelaksanaan kegiatan yang sifatnya operasional dan kesiapan kualitas sumber daya aparatur yang mendukung keberhasilan implementasi sesuai keinginan masyarakat.

Proses implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat secara umum belum terlaksana sesuai dengan tujuan organisasi dan tujuan kebijakan. Hal itu mengindikasikan bahwa keberhasilan tujuan kebijakan yang ingin dicapai, karena kurangnya kemampuan organisasi Satpol PP dalam mendukung kebijakan yang bersangkutan. Sehingga masih ditemui masih banyak warga masyarakat belum sepenuhnya mentaati aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah, bahkan kecenderungan terjadi peningkatan dalam masyarakat yang mengkonsumsi minuman keras secara bebas dikalangan masyarakat.

Padahal dalam aplikasi kebijakan, Satpol PP sebagai implementor kebijakan sedapat mungkin memenuhi keinginan dan harapan masyarakat. Karena fungsi pemerintah adalah sebagai provider yang berfungsi menyediakan aneka kebutuhan

barang maupun jasa bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam aplikasi kebijakan yang mencerminkan kegiatan pengawasan dan penertiban minuman beralkohol dalam realitasnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Secara teknis, untuk mengetahui kondisi ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, dapat teramati dari adanya pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP, dan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Melihat kondisi yang demikian menimbulkan kesan bahwa Pemerintah Daerah sengaja melakukan pembiaran bagi masyarakat yang mengkonsumsi, memproduksi, dan mengedarkan minuman beralkohol, secara bebas di lingkungan masyarakat. Sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi kebijakan di lapangan sehingga dapat berimplikasi pada tindak penyimpangan atas tujuan kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan perilaku implementor kebijakan, maka dibutuhkan pengawasan baik internal maupun eksternal.

Dengan demikian, penerapan kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol, sangat dibutuhkan adanya dukungan sumber daya aparat Satpol PP yang memiliki keterampilan teknis yang menyangkut dengan aspek hukum, yang ditunjukkan melalui kemampuan memahami cara kerja, penggunaan metode dan prosedur pelaksanaan kegiatan, kemampuan bekerja secara efektif, serta kemampuan melihat organisasi secara keseluruhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006

Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari yang menjadi sorotan dan perhatian, yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Wilayah Kabupaten Manokwari, yang hingga kini masih mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu berbagai langkah kebijakan operasional dalam proses penegakkan Peraturan Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja,

ditempuh melalui beberapa aspek yaitu, sosialisasi, pencegahan, dan penegakkan.

a. Sosialisasi (Preemtif)

Salah satu langkah yang dilakukan untuk menjaga kredibilitasnya Pemerintah Daerah di hadapan masyarakat adalah bagaimana kebijakan yang telah disusun dan dirumuskan, dapat diimplementasikan di lapangan secara efektif dan efisien. Melalui koordinasi implementor kebijakan dan Tim operasional pengawasan dapat mensosialisasikan kebijakan yang telah disusun dan dirumuskan tersebut kepada masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat luas, dan terutama yang berhubungan dengan minuman beralkohol, baik penjual, pemasok, pemakai, atau yang memproduksi minuman keras tradisional (Milo).

Realitas menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum berlangsung secara efektif, karena tim yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya di lapangan berjalan secara parsial, kalau toh sosialisasi itu ada, namun sangat jarang dilakukan. Koordinasi yang dilakukan untuk menyatukan langkah bagi dalam proses melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, tidak berlangsung efektif karena berbagai kepentingan yang terjadi di lapangan. Disamping itu Satpol PP sebagai implementor kebijakan, mengalami kesulitan secara operasional di lapangan karena kurangnya anggaran dan fasilitas yang memadai.

Setelah kebijakan tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol diimplementasikan pada bulan pebruari tahun 2007, kebijakan itu mendapat tanggapan yang beragam dari kalangan masyarakat, baik yang mendukung maupun menolak peraturan tersebut. Sebagian kalangan menilai bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah daerah untuk membasmi peredaran minuman beralkohol di Distrik Manokwari Barat khususnya dan di Kabupaten Manokwari pada umumnya, sangatlah sulit untuk dilakukan.

Seharusnya pemerintah daerah menyikapi hal tersebut dengan arif dan bijaksana, terutama aparat pelaksana kebijakan guna mengambil langkah-langkah, guna mencari solusi yang terbaik. Oleh sebab itu implementor kebijakan perlu mengambil langkah-langkah yang sifatnya persuasif melalui

berbagai pendekatan, sehingga dari berbagai kalangan masyarakat tersebut tidak merasa dirugikan, melalui keterlibatan dari berbagai instansi sektoral dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan dapat mencari solusi dalam penyelesaiannya.

Sebenarnya manfaat yang dihasilkan dari sosialisasi yang dilakukan terkait dengan bagaimana dan sejauhmana implementasi kebijakan tersebut membawa perubahan perilaku masyarakat. Artinya bahwa semakin baik implementasi itu dirasakan manfaat dan memberikan perubahan bagi masyarakat, maka semakin baik masyarakat memberikan dukungan terhadap kebijakan. Namun demikian karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan, sehingga minuman beralkohol yang diproduksi, dikonsumsi, diedarkan, dan dijual bebas di lingkungan masyarakat. malah jika ditelusuri lebih jauh ke wilayah sekitar pinggiran kota dan kampung akan mudah menemukannya tempat penjualan dan tempat orang meminum beralkohol secara bebas.

Kenyataan tersebut dapat terjadi karena belum ada niat baik dari implementor kebijakan sehingga intensitas sosialisasi yang dilakukan tidak dilakukan secara kontinyu dan menyeluruh di seluruh wilayah distrik. Sosialisasi yang dilakukan dengan melibatkan Tim Pengawas yang dibentuk Pemerintah daerah, hanya di atas kertas saja karena selama 3 (tiga) tahun belakangan tidak pernah dilakukan lagi. Hal itu menyebabkan minuman beralkohol semakin bebas ditemukan di lingkungan masyarakat, baik yang diproduksi secara tradisional (Milo), maupun yang berasal dari luar wilayah. Oleh sebab itu Satpol PP seyogyanya meninjau kembali kebijakan itu dengan memberikan masukan kepada pejabat publik, guna menentukan tindakan lebih lanjut.

b. Pencegahan (Preventif)

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam proses Penengakkan Perda tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol, yang diselenggarakan di wilayah Distrik Manokwari Barat, dengan melibatkan Tim Pengawas pada tahapan pencegahan (preventif) dilakukan melalui penertiban, sekaligus penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, terutama yang bersinggungan dengan minuman beralkohol. Hal itu dilakukan dalam rangka untuk

mencegah dan mengendalikan semakin maraknya peredaran minuman beralkohol di wilayah Distrik Manokwari Barat.

Biasanya implementor kebijakan mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta tokoh adat untuk berpartisipasi aktif, dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat, dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan terutama pada kalangan generasi muda, melalui kegiatan-kegiatan bakti sosial, melalui tempat ibadah di lingkungan masing masing. Disamping itu pula melakukan komunikasi dengan mengajak Pemerintah Distrik beserta jajarannya untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masing-masing, guna mencegah maraknya peredaran minuman keras di wilayahnya masing-masing.

Realitas yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh implementor kebijakan selama ini, intensitas sangat rendah, sehingga belum memberikan dampak terhadap perubahan kondisi kehidupan masyarakat. Upaya yang dilakukan ini merupakan proses pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan edukatif dan mengajak para tokoh untuk berpartisipasi aktif, belum terlaksana dengan baik, karena kurang mendapat respon dari masyarakat.

Persoalan makin maraknya minuman keras yang kembali diproduksi dan dijual oleh masyarakat, terutama minuman keras tradisional (Milo) disebabkan karena disamping kurangnya pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan secara terpadu dan menyeluruh. Disisi lain, juga disebabkan karena beberapa kalangan masyarakat yang masih bergantung hidup dan keluarganya dari memproduksi dan menjual minuman beralkohol sebagai sumber pendapatannya.

Keterlibatan berbagai instansi terkait, dengan melakukan pendekatan yang sifatnya persuasif melalui penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat, dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, agama dan adat istiadat setempat yang bercirikan islami dan religius sangatlah diperlukan. Konsep religius harus segera diimbangi dengan realisasi pembangunan sektor pendidikan untuk

menanamkan nilai-nilai agama sebagai dasar peletak landasan spiritual, moril dan etika.

Upaya penertiban yang dilakukan oleh implementor kebijakan selama ini terkesan berlangsung kurang efektif, karena masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut kurang melakukan koordinasi secara intensif. Dengan keterlibatan banyak pihak dalam implementasi kebijakan dalam memberantas minuman beralkohol sebenarnya sangat menguntungkan, karena pihak dapat menyampaikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam berbagai aspek dan caranya masing-masing. Namun sebaliknya akan menjadi kurang bermanfaat, manakala kurangnya koordinasi yang dilakukan, sehingga masing-masing pihak saling mengharapakan.

Penertiban larangan minuman keras yang diselenggarakan oleh implementor kebijakan merupakan upaya dari Pemerintah Daerah dalam mengatur tata kehidupan dalam masyarakat yang lebih baik, sehingga diharapkan dari pengaturan tersebut, akan tercipta tata kehidupan yang harmonis, tentram, aman dan damai, bagi setiap anggota masyarakat. Oleh sebab itu, produk layanan pemerintahan itu diharapkan dapat memberikan jaminan kemudahan dan keadilan bagi setiap warga masyarakat, untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Karena salah satu tujuan dari kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah adalah terwujudnya perubahan-perubahan sikap warga masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat tersebut.

Berbagai persoalan yang melingkupi upaya pencegahan yang dilakukan mengindikasikan bahwa masyarakat masih membutuhkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dari implementor kebijakan, sehingga masyarakat dapat memahami kebijakan itu dengan baik. Ketepatan dan keakuratan penyampaian informasi melalui pembinaan dan penyuluhan tersebut diharapkan dapat berimplikasi pada perubahan-perubahan dari kalangan masyarakat, terutama berpartisipasi untuk melakukan pencegahan beredarnya minuman beralkohol di kalangan masyarakat, terutama kalangan generasi muda.

c. Penegakkan (Represif)

Upaya yang dilakukan dalam proses penegakkan Peraturan Daerah tentang larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan

penjualan serta memproduksi minuman beralkohol yang diselenggarakan di wilayah Distrik Manokwari Barat, pada tahap represif dilakukan melalui kerjasama dengan Tim Pengawas terkait seperti pihak Kepolisian Resort Manokwari Barat dan Pihak kejaksaan melalui penyidikan di tempat kejadian. Kegiatan itu ditempuh jika dalam hal pelanggaran Peraturan Daerah sudah tidak bisa ditoleransi, misalnya sudah ditegur secara lisan maupun tertulis tetap ada pelanggaran Peraturan Daerah maka dilakukan tindakan represif. Pelaku pelanggaran akan ditindak baik secara yustisial maupun non yustisial.

Upaya yang dilakukan melalui tindakan represif dapat diambil oleh implementor kebijakan melalui beberapa cara diantaranya, kalau proses penyidikan dilakukan kepada setiap oknum masyarakat/pengusaha dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan Tim Pengawas yaitu pihak Kepolisian Resort dan Kejaksaan Negeri Manokwari, maka akan diambil langkah-langkah dalam melakukan inspeksi mendadak (Sidak) secara yudisial, sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Sementara kalau proses penegakkan melalui Sidak yang dilakukan sendiri oleh Satpol PP, maka oknum masyarakat yang kedapatan melakukan pelanggaran, akan diserahkan kepada Kepolisian Resort setelah membuat berita acara pemeriksaan.

Pelaksanaan penertiban yang dilakukan implementor kebijakan melalui tindakan represif secara yudisial maupun non yudisial, pada umumnya diarahkan pada tempat-tempat penjualan, seperti toko, tempat hiburan (caffe), gudang tempat penyimpanan, maupun tempat-tempat produksi (Ketel). Pelaksanaan penegakan melalui kegiatan Sidak, dilakukan setelah mendapatkan informasi di lapangan, atau melalui informasi dari petugas di lapangan.

Berbagai tindakan represif yang dilakukan implementor kebijakan dalam melakukan Sidak, terkesan tidaklah menyeluruh pada lokasi-lokasi yang diduga terdapat minuman beralkohol, tetapi hanya pada lokasi tertentu saja. Dengan tindakan yang dilakukan demikian, memberikan indikasi bahwa implementor kebijakan belum melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan benar, karena tidak menjangkau keseluruhan masyarakat yang terlibat dalam minuman beralkohol, sebab disinyalir ada tempat-tempat

yang tidak disidak tersebut dibekengi oleh aparat penegak hukum.

Realitas yang dijumpai di lapangan menunjukkan bahwa kurang optimalnya tindakan represip yang dilakukan oleh implementor kebijakan, bukan hanya dari aspek belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun juga intensitas Sidak yang dilakukan juga belum dilakukan secara kontinyu. Karena sidak yang dilakukan hanyalah pada waktu-waktu tertentu saja, sehingga memberi kesan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terprogram dan terstruktur dengan baik, yang dilaksanakan oleh seluruh implementor kebijakan di lapangan.

Kurangnya intensitas tindakan represip yang dilakukan implementor kebijakan di lapangan, salah satu penyebabnya karena kurangnya kemampuan sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh Satpol PP dalam menunjang pelaksanaan tugas, serta kurangnya anggaran yang dimiliki dalam pelaksanaan operasionalisasi kegiatan di lapangan. Disamping itu pula proses koordinasi yang dilakukan dengan pihak Kepolisian Resort Manokwari dalam pelaksanaan kegiatan penegakan Perda melalui Sidak yang dilakukan, sering tidak memperoleh hasil, karena adanya keterlibatan oknum-oknum tertentu yang membekengi peredaran minuman beralkohol tersebut.

Menyikapi hal tersebut, dibutuhkan peran Satpol PP Kabupaten Manokwari berkewajiban untuk menegakan Peraturan Daerah yang bekerjasama dengan Kepolisian Resort Manokwari untuk menangani berbagai permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari kasus minuman beralkohol. Mengingat tugas Polri adalah sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat, beserta dengan komponen masyarakat lainnya untuk bersatu padu dan bahu-membahu dalam upaya mencegah dan menanggulangi berbagai dampak yang ditimbulkan dari minuman beralkohol.

Pemberdayaan para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam penanggulangan bahaya minuman beralkohol, sangatlah penting dalam realitas kehidupan masyarakat dewasa ini. Niat baik dan partisipasi aktif dari para tokoh tersebut melalui pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kondisi

kehidupan masyarakat yang lebih baik, tertib, tentram dan aman. Konsekuensi logis tersebut dikarenakan, dalam tataran kehidupan masyarakat Manokwari yang menganut paham religius yang kental, sebagai tempat yang Bersejarah (Kota Injil). Melalui pendekatan yang sifatnya agamis yang dilakukan oleh para tokoh, diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi sebagai dampak yang ditimbulkan dari minuman beralkohol di kalangan masyarakat di Distrik Manokwari Barat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat penulis menarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol yang diselenggarakan di Distrik Manokwari Barat, belum terlaksana secara optimal. Ketidakefektifan implementasi kebijakan yang diselenggarakan, karena kurangnya kemampuan sumber daya aparat pelaksana kebijakan, kurangnya sarana dan prasarana penunjang, dan kurangnya alokasi anggaran yang memadai sehingga kebijakan yang diimplementasikan belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol meliputi: organisasi yaitu penataan struktur organisasi, dukungan sumber daya, kemampuan berkoordinasi, dan komitmen implementor kebijakan dalam untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai yang ditetapkan. Interpretasi, yaitu kejelasan dan pemahaman tugas dan fungsi, keinginan dan konsistensi, terhadap makna dari kebijakan oleh implementor kebijakan, dan aplikasi. yaitu ketersediaan sarana dan prasarana, tanggung jawab, dan ketaatan terhadap aturan, namun belum dapat dapat terlaksana dengan baik dalam mendukung keberhasilan kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol, sehingga ketentraman dan ketertiban masyarakat di Distrik Manokwari Barat, belum dapat diwujudkan .

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk menciptakan ketentaraman dan ketertiban dalam masyarakat, dilakukan melalui kebijakan larangan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah Distrik Manokwari Barat dilakukan melalui sosialisasi (preemtif), pencegahan (prefentif), dan penegakan (represif). sebagai bentuk penegakkan Peraturan Daerah, yaitu; sosialisasi pelaksanaannya dengan pembinaan dan penyuluhan, penertiban dilaksanakan dengan pengawasan; dan penegakkan dengan diikuti penyidikan yang dilakukan di lapangan, namun belum dilakukan secara terpadu dan menyeluruh sehingga hasil; yang dicapai belum dapat mewujudkan Manokwari sebagai Kota yang Bersejarah..
3. Pemerintah daerah perlu melakukan penguatan kapasitas kelembagaan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja selaku implementor kebijakan melalui pemberian kewenangan dan tanggungjawab secara jelas, memberikan alokasikan dana anggaran yang memadai, melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala, serta proses pemberdayaan melalui rekruiemen dan pendistribusian aparat yang memiliki daya kompetensi tinggi serta memberikan kesempatan kepada aparat untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuannya melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal (Diklat teknis).

SARAN

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 yang diselenggarakan di Distrik Manokwari Barat belum mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan, untuk itu beberapa saran yang diajukan untuk melengkapi hasil penelitian sebagai berikut:

1. Sebuah kebijakan yang diimplementasikan, tingkat keberhasilannya sangat tergantung dari berbagai factor, diantaranya penyediaan sumber daya aparat yang berkualitas, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, serta penyediaan alokasi anggaran yang cukup. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian dari Pemerintah daerah dalam menyediakan hal tersebut, sehingga diharapkan implementasi kebijakan dapat mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan.
2. Pemerintah Daerah perlu melakukan optimalisasi peran implementor kebijakan termasuk Tim Pengawas yang dibentuk Pemerintah Daerah mulai dari pelaksanaan fungsi organisasi, interpretasi, dan penerapan sehingga kebijakan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu perlu disiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sehingga memudahkan implementor kebijakan dalam memahami kebijakan dalam operasionalisasinya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi., 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Effendy, Khasan, 2010, *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*, CV. Indra Prahasta, Bandung.
- Jones, Charles. O. 1994. *Kebijakan Publik*. Terjemahan Ricky Istamto. Cetakan Kedua. Jakarta: Rajawali.
- _____.1996. *An Introduction to the Study of Public Policy. Pengantar Kebijakan Publik*. Editor Budiman. Cetakan Ketiga. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nazir, Moh, 2011. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ndraha Taliziduhu, 1985, *Desain Riset dan Teknik Penyusunan Karya Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta
- Nugroho, Riant, 2009. *Public Policy. Teori Kebijakan - Analisis Kebijakan – Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rusidi, 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, BKU Program Pasca Sarjana: IIP-Unpad, Bandung.
- Sugiamana, A. Gima., 2008, *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*, Guardaya Intimarta (Edisi Pertama), Bandung.
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta.

- Wahab, Solichin Abdul, 2010. Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.